

SKRIPSI

**DINAMIKA HAK UJI MATERIL
DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2011-2019**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

UNIVERSITAS ANDALAS

IKHBAL GUSRI

NIM : 1510112156

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Dosen Pembimbing


Arfiani, SH, MH

Henny Andriani, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2021

No. Reg 11/PK-V/II/2021

	No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa: IKHBAL GUSRI	No. Alumni Fakultas :
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang/23 Agustus 1997 b) Nama Orang Tua : Emillius dan Wisdarnis c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Tata Negara e) No. Bp : 1510112156	f) Tanggal Lulus : 30 Maret 2021 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 5 Tahun 9 Bulan i) IPK : 3,84 j) Alamat : Rimbo Datar, Padang	

DINAMIKA HAK UJI MATERIL DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2011-2019
(Ikhbal Gusri, 1510112156, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 255 Halaman, Tahun 2021)

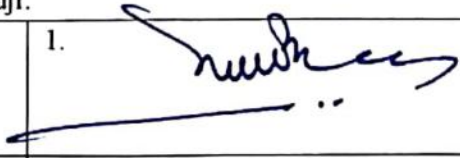

ABSTRAK

Amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Mahkamah Agung diberikan kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Berdasarkan catatan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, setidaknya terdapat lebih dari 62.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berdampak tumpah tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Buruknya regulasi tersebut berimplikasi pada hak-hak warga negara. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut ditempuh melalui pengujian di Mahkamah Agung. Beberapa persoalan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung seperti jangka waktu pemeriksaan perkara, sidang pemeriksaan yang tertutup, hingga pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi menjadi penghambat bagi pencari keadilan. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan, yaitu *pertama*, bagaimana konsep hak uji materil ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, bagaimana dinamika hak uji materil di Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2011-2019. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Dari hasil penelitian terhadap 410 putusan hak uji materil dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri merupakan peraturan yang paling banyak diuji, terdapat objek peraturan perundang-undangan yang diuji dengan menggunakan nomenklatur lain, proses pemeriksaan permohonan hak uji materil belum efisien, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap UUD 1945 yang melampaui kewenangannya, dan terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis memberikan saran untuk melakukan revisi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak uji materil di Mahkamah Agung dan perlunya sinkronisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung dalam kewenangan hak uji materil.

Kata kunci : Mahkamah Agung, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Hak Uji Materil

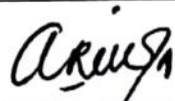
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Maret 2021.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.	Alsyam, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: